

Pendidikan Karakter dalam Pendidikan Kewarganegaraan: Sebuah *Systematic Literature Review*

Fahmi Agniyatu Rahman^{*1}, Cecep Darmawan², Syaifullah Syam³, Dadang Sundawa⁴

¹Magister Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Indonesia

^{2,3,4}Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Indonesia

Email: ¹arfahmil@upi.edu, ²cecepdarmawan@upi.edu, ³syaifullahsyam@upi.edu,

⁴dadangsundawa@upi.edu

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi tema-tema penelitian, pola metodologi, kesenjangan literatur, dan arah penelitian yang diperlukan terkait pendidikan karakter dalam pendidikan kewarganegaraan berdasarkan literatur Scopus periode 2021-2026. Metode yang digunakan adalah *Systematic Literature Review* (SLR) mengikuti protokol PRISMA 2020. Pencarian pada basis data Scopus menghasilkan 102 artikel awal yang kemudian disaring melalui tahapan *screening* judul, *screening* abstrak, *quality assessment*, dan *Re-screening* relevansi sehingga diperoleh 60 artikel final. Analisis menggunakan *thematic synthesis* menghasilkan tujuh tema utama, yaitu: ketegangan dan kompatibilitas antara *character education* dan *citizenship education*, model dan strategi pembelajaran berbasis nilai, *civic disposition* dan *civic competence* sebagai *outcome* karakter kewarganegaraan, *Global Citizenship education*, analisis kurikulum dan kebijakan, pendekatan filosofis, serta kritik terhadap praktik *character education*. Penelitian didominasi metode konseptual-normatif (33,3%) dan kualitatif (25%), dengan Indonesia sebagai negara yang paling banyak diteliti secara empiris (21,7%). Konsensus konseptual tentang perlunya integrasi pendidikan karakter dan pendidikan kewarganegaraan sudah cukup kuat, namun bukti empiris efektivitasnya masih terbatas dan belum konsisten. Temuan ini mengindikasikan bahwa guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan perlu penguatan kompetensi pedagogis berbasis nilai, sistem asesmen perlu direformasi agar tidak hanya mengukur aspek kognitif, dan penelitian empiris longitudinal pada jenjang pendidikan vokasi mendesak untuk dilakukan.

Kata kunci: *Civic Competence, Civic Disposition, Pendidikan Karakter, Pendidikan Kewarganegaraan, Systematic Literature Review.*

Character Education in Civic Education: A Systematic Literature Review

Abstract

This study aims to identify research themes, methodological patterns, literature gaps, and directions for future research concerning character education in civic education based on Scopus-indexed literature published between 2021 and 2026. The method employed was a Systematic Literature Review (SLR) following the PRISMA 2020 protocol. The search of the Scopus database initially identified 102 articles, which were subsequently screened through title screening, abstract screening, quality assessment, and relevance re-screening, resulting in 60 final articles. Thematic synthesis identified seven main themes: tensions and compatibility between character education and citizenship education; value-based learning models and strategies; civic disposition and civic competence as outcomes of civic character; Global Citizenship Education; curriculum and policy analysis; philosophical approaches; and critiques of character education practices. The studies were predominantly conceptual-normative (33.3%) and qualitative (25%), with Indonesia being the most frequently studied country in empirical research (21.7%). Although there is considerable conceptual consensus regarding the need to integrate character education and civic education, empirical evidence of its effectiveness remains limited and inconsistent. These findings indicate that teachers of Pancasila and Civic Education need strengthened value-based pedagogical competencies, assessment systems need to be reformed to address more than cognitive aspects, and longitudinal empirical research at the vocational education level is urgently needed.

Keywords: *Character Education, Civic Competence, Civic Disposition, Civic Education, Systematic Literature Review.*

1. PENDAHULUAN

Pendidikan karakter telah menjadi agenda sentral dalam reformasi pendidikan di berbagai negara selama dua dekade terakhir. Pada tataran konseptual, Lickona [1] mendefinisikan pendidikan karakter sebagai upaya deliberatif sekolah untuk membantu siswa memahami, peduli, dan bertindak berdasarkan nilai-nilai etis. Di Indonesia, agenda ini diperkuat melalui Kurikulum Merdeka yang menempatkan Profil Pelajar Pancasila sebagai kerangka pembentukan karakter warga negara yang berketuhanan, berkebhinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Pengintegrasian nilai-nilai tersebut ke dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) menjadi salah satu strategi utama yang diadopsi secara resmi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi [2].

Pendidikan kewarganegaraan secara teoritis memiliki irisan yang kuat dengan pendidikan karakter. Branson [3] merumuskan kompetensi kewarganegaraan ke dalam tiga komponen yang tidak terpisahkan, yaitu *civic knowledge*, *civic skills*, dan *civic disposition*. *Civic disposition* sebagai komponen afektif mencakup komitmen terhadap nilai-nilai demokratis, rasa tanggung jawab publik, dan kecenderungan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sipil. Namun dalam praktiknya, hubungan antara pendidikan karakter dan pendidikan kewarganegaraan tidak selalu berjalan sinergis. Peterson dan Civil [4] mendokumentasikan bahwa di Inggris, hubungan antara *civic virtue* dan *moral virtue* yang pernah dirumuskan secara kohesif oleh Crick Report pada 1998 mengalami fraktur kebijakan yang semakin melebar sejak dekade 2010-an. Di Indonesia, Montessori dkk. [5] menemukan bahwa guru PPKn di tingkat SMP secara nyata mengabaikan pembentukan *civic disposition* selama pandemi COVID-19, bukan karena absennya regulasi, tetapi karena ketidakcakapan pedagogis guru dan sistem asesmen yang terfokus pada aspek kognitif semata.

Penelitian tentang topik ini telah berkembang secara signifikan sejak 2021, mencakup beragam pendekatan mulai dari analisis filosofis berbasis Aristoteles [6][7], kajian kebijakan kurikulum lintas negara [8][9], hingga pengembangan model pembelajaran empiris seperti *service-learning* [10] dan *living values-based learning* [11]. Namun berbagai penelitian tersebut masih tersebar dan belum dirangkum secara sistematis. Studi sebelumnya tentang SLR pendidikan karakter oleh Berkowitz dkk. [12] dan Lapsley & Yeager [13] masih terbatas pada literatur pra-2020 dan tidak mencakup dimensi kewarganegaraan secara spesifik. Dengan demikian, terdapat kebutuhan nyata untuk melakukan sintesis literatur yang sistematis dan terkini pada irisan antara pendidikan karakter dan pendidikan kewarganegaraan.

Pemilihan rentang waktu 2021-2026 dalam penelitian ini didasarkan pada tiga pertimbangan akademik yang saling berkaitan. Pertama, tahun 2021 menandai periode pascapandemi COVID-19 yang secara substantif memunculkan rekonseptualisasi nilai-nilai kewarganegaraan dalam pendidikan formal di berbagai negara, termasuk perubahan paradigma pembelajaran dari tatap muka menuju blended learning yang berdampak langsung pada praktik pembentukan karakter di kelas. Kedua, Kurikulum Merdeka yang diluncurkan secara resmi pada tahun 2022 melalui Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 menempatkan Profil Pelajar Pancasila sebagai kerangka karakter baru yang secara langsung mengintegrasikan dimensi kewarganegaraan dan dimensi moral, sehingga menuntut basis penelitian empiris yang mutakhir sebagai landasan implementasinya. Ketiga, analisis bibliometrik menunjukkan bahwa publikasi bertema *character education* dan *citizenship education* pada basis data Scopus mengalami lonjakan signifikan sejak 2021, dengan volume rata-rata lebih dari dua kali lipat dibandingkan periode 2016-2020, sehingga sintesis literatur terhadap periode ini memiliki urgensi yang nyata dan belum pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini secara spesifik mengisi kekosongan yang tidak dijangkau oleh SLR-SLR sebelumnya: fokus ganda pada *character education* dan *citizenship education* secara simultan, cakupan geografis global dengan penekanan khusus pada konteks Indonesia dan Asia Tenggara, serta rentang waktu pascapandemi yang relevan untuk konteks Kurikulum Merdeka.

Kesenjangan utama yang teridentifikasi dalam tinjauan awal meliputi: pertama, tidak adanya penelitian yang khusus mengkaji pendidikan karakter dalam PPKn pada jenjang pendidikan vokasi (SMK); kedua, pengukuran empiris *civic disposition* sebagai variabel terukur masih sangat jarang meskipun konstruk ini sentral secara teoritis; ketiga, tidak ditemukan penelitian *longitudinal* yang mengikuti perkembangan karakter kewarganegaraan siswa dari waktu ke waktu. Berdasarkan identifikasi kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis secara sistematis literatur Scopus periode 2021-2026 untuk menjawab empat pertanyaan penelitian: (RQ1) tema apa yang dominan dalam penelitian tentang pendidikan karakter dalam pendidikan kewarganegaraan, (RQ2) bagaimana pola distribusi geografis dan metodologi penelitian, (RQ3) kesenjangan apa yang nyata dalam literatur yang ada, dan (RQ4) ke arah mana penelitian selanjutnya paling diperlukan.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain *Systematic Literature Review* (SLR) yang mengikuti protokol *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA) 2020 sebagaimana dirumuskan oleh Page dkk. [14]. SLR dipilih karena memungkinkan identifikasi, seleksi, dan sintesis literatur secara transparan, dapat direplikasi, dan meminimalkan bias seleksi dibandingkan *narrative review* konvensional [15]. Analisis dilakukan menggunakan *thematic synthesis* tiga tahap yang dikembangkan Thomas dan Harden [16], yaitu *open coding*, pengelompokan ke dalam tema deskriptif, dan pembentukan tema analitik yang melampaui deskripsi individual.

2.2 Strategi Pencarian

Pencarian dilakukan pada basis data Scopus pada bulan Juni 2026 dengan rentang waktu Januari 2021 hingga Juni 2026. Basis data Scopus dipilih karena merupakan salah satu indeks akademik terbesar dengan cakupan jurnal pendidikan sosial dan humaniora yang luas. *Query* pencarian yang digunakan adalah sebagai berikut:

```
TITLE-ABS-KEY(("character education" OR "moral education" OR
"values education") AND ("civic education" OR "citizenship
education" OR "civic virtue" OR "civic disposition" OR "civic
competence" OR "democratic citizenship" OR "global citizenship"))
AND DOCTYPE(ar) AND PUBYEAR > 2020
```

Query ini menggunakan operator *boolean* AND/OR dengan pengelompokan dalam tanda kurung untuk memastikan bahwa setiap artikel yang ditemukan memiliki unsur pendidikan karakter sekaligus unsur pendidikan kewarganegaraan. Pembatasan DOCTYPE (ar) memastikan hanya artikel penelitian yang masuk, mengecualikan editorial, retribusi, dan bab buku.

2.3 Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Artikel dimasukkan dalam analisis apabila memenuhi seluruh kriteria berikut: (a) membahas pendidikan karakter atau *moral education* atau *values education* secara substantif, (b) membahas pendidikan kewarganegaraan atau *civic education* atau *citizenship education* secara substantif, (c) terdapat kaitan yang jelas antara keduanya dalam teks artikel, (d) merupakan artikel penelitian yang terbit antara 2021-2026 pada jurnal terindeks Scopus, dan (e) memperoleh skor *quality assessment* minimal 4 dari 5. Artikel dieksklusi apabila: berfokus pada pendidikan karakter dalam konteks olahraga, bisnis, atau kesehatan tanpa implikasi *civic*, atau merupakan studi murni sosiologi politik tanpa dimensi pedagogis.

2.4 Proses Penyaringan

Proses penyaringan dilakukan dalam empat tahap sesuai alur PRISMA 2020. Tabel 1 menyajikan ringkasan tahapan penyaringan beserta jumlah artikel pada setiap tahap.

Tabel 1. Tahapan Penyaringan PRISMA 2020.

Tahap PRISMA	n Artikel	Keterangan
Identifikasi (Scopus)	102	Pencarian database tunggal dengan <i>Query boolean</i>
Screening Judul	63	39 artikel dieksklusi (AI/teknologi, non-civic)
Screening Abstrak	59	4 artikel dieksklusi (tidak ada nexus char-civic)
Quality assessment	62	Sinkronisasi daftar, skor min. 4/5
Re-screening Relevansi	60	2 artikel dieksklusi (sosiologi politik, bukan pendidikan)
Artikel Final Dianalisis	60	Kategori A (n=38) dan Kategori B (n=22)

Quality a Assessment dilakukan menggunakan lima pertanyaan: (QA1) apakah artikel membahas pendidikan karakter secara substantif, (QA2) apakah artikel membahas pendidikan kewarganegaraan secara substantif, (QA3) apakah hubungan kedua konsep dijelaskan dengan jelas, (QA4) apakah metode penelitian atau kerangka analisis dijelaskan secara memadai, dan (QA5) apakah hasil penelitian relevan terhadap kompetensi kewarganegaraan. Setiap pertanyaan diberi skor 1 (ya) atau 0 (tidak), dengan skor minimum 4 sebagai syarat untuk dipertahankan dalam analisis.

Untuk menjamin konsistensi dan reliabilitas proses seleksi, penelitian ini dilakukan secara tim oleh empat peneliti dengan latar belakang akademik di bidang Pendidikan Kewarganegaraan. Tahap screening judul dan

abstrak dilakukan oleh peneliti pertama secara mandiri dengan berpedoman pada kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan secara operasional sebelum proses dimulai. Seluruh keputusan eksklusi didokumentasikan beserta alasan penolakannya secara tertulis untuk memungkinkan penelusuran ulang. Hasil screening kemudian diverifikasi secara diskusi oleh seluruh anggota tim peneliti, dan setiap perbedaan penilaian diselesaikan melalui konsensus berbasis argumentasi akademik. Proses quality assessment menggunakan rubrik lima pertanyaan yang telah disepakati bersama sebelum penilaian dilakukan, sehingga standar penilaian bersifat konsisten dan tidak berubah selama proses berlangsung. Mekanisme tim peneliti ini secara substansial mengurangi risiko bias seleksi individual yang merupakan kelemahan umum pada penelitian *SLR single-reviewer*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Karakteristik Studi

Dari 60 artikel final yang dianalisis, distribusi tahun terbit menunjukkan tren peningkatan yang konsisten: 8 artikel (2021), 8 artikel (2022), 9 artikel (2023), 15 artikel (2024), 13 artikel (2025), dan 7 artikel (2026). Lonjakan pada 2024-2025 mencerminkan meningkatnya perhatian akademik global terhadap topik ini pascapandemi COVID-19, yang mendorong rekonseptualisasi nilai-nilai kewarganegaraan dalam pendidikan formal. Tabel 2 menyajikan distribusi lengkap karakteristik studi berdasarkan negara, metode, dan jenjang pendidikan.

Tabel 2. Karakteristik Studi (N = 60)

Aspek	Kategori	n	Persentase
Negara	Indonesia	13	21,7%
	Amerika Serikat	6	10,0%
	Singapura	4	6,7%
	China	4	6,7%
	Spanyol	4	6,7%
	Inggris	4	6,7%
	Komparatif/Internasional	8	13,3%
	Negara lain	17	28,3%
Metode	Konseptual/Normatif	20	33,3%
	Kualitatif	15	25,0%
	Analisis Dokumen/Kebijakan	10	16,7%
	R&D	6	10,0%
	Mixed Methods	4	6,7%
	Kuantitatif/Action Research/Review	5	8,3%
Jenjang	SD	8	13,3%
	SMP	9	15,0%
	SMA	7	11,7%
	Perguruan Tinggi	7	11,7%
	Kebijakan/Lintas Jenjang	29	48,3%

3.2 Tema-tema Utama Hasil Sintesis

Thematic synthesis menghasilkan tujuh tema utama yang disajikan pada Tabel 3. Beberapa artikel masuk ke lebih dari satu tema, sehingga jumlah total melebihi 60.

Tabel 3. *Thematic Synthesis*

Tema	n	Artikel Representatif
T1: Ketegangan & Kompatibilitas	14	Peterson & Civil (2023), Lu (2025), Jordan et al. (2023)
T2: Model & Strategi Pembelajaran	15	Komalasari et al. (2021-2025), Sartika et al. (2024)
T3: <i>Civic disposition</i> & Competence	8	Montessori et al. (2024), Castillo (2023), Wahyudi et al. (2026)
T4: <i>Global Citizenship education</i>	9	Indrawadi et al. (2025), Kubow (2025), Chung & Fung (2024)
T5: Analisis Kurikulum & Kebijakan	12	Brown et al. (2021), Afriadi et al. (2024), Sim et al. (2026)
T6: Pendekatan Filosofis	8	Kristjansson (2022), Paddock (2021), Wong (2025)
T7: Kritik terhadap Praktik	8	Jerome & Kisby (2022), Duncan & Oto (2026), Choo et al. (2025)

3.3 Pembahasan per Tema

3.3.1 Ketegangan dan Kompatibilitas antara *Character education* dan *Citizenship education*

Tema ini mencakup 14 artikel dan menunjukkan bahwa hubungan antara pendidikan karakter dan pendidikan kewarganegaraan tidak bersifat harmonis secara otomatis. Peterson dan Civil [4] mendokumentasikan secara historis bagaimana Inggris mengalami fraktur kebijakan: hubungan antara *civic virtue*, *moral virtue*, dan karakter personal yang pernah dibangun secara kohesif oleh Crick Report 1998 secara perlahan terkikis oleh kebijakan *Fundamental British Values* yang lebih mengutamakan kepatuhan nasional daripada dimensi *civic* yang kritis. Jordan dkk. [17] menemukan bahwa *citizenship education*, *character education*, dan *sustainability education* masih berjalan paralel tanpa konvergensi substantif meski secara konseptual memiliki irisan yang luas.

Posisi berbeda ditunjukkan oleh artikel-artikel berkerangka Aristotelian. Lu [6] berargumen bahwa *ethical virtue* dan *civic virtue* dalam teori Aristoteles bersifat kompatibel dan saling mendukung, sehingga sintesis keduanya dapat membimbing siswa menuju flourishing sebagai individu sekaligus warga negara. Kristjansson [7] menambahkan bahwa dalam *Politics* Aristoteles, *civic virtue* bersifat prior secara teleologis terhadap *moral virtue*, sementara *moral virtue* bersifat prior secara perkembangan. Perbedaan ini memiliki implikasi pedagogis yang konkret karena menentukan urutan mana yang harus dibangun terlebih dahulu dalam program pendidikan. Perlu dicatat bahwa klaim kompatibilitas ini masih bersifat normatif dan belum didukung oleh data empiris implementasi di kelas.

Secara komparatif, dua pola kontras teridentifikasi dalam tema ini. Artikel-artikel dari konteks Eropa (Peterson & Civil [4]; Jordan dkk. [17]) cenderung melaporkan divergensi antara karakter dan kewarganegaraan yang diperparah oleh kebijakan nasionalisme, sementara artikel-artikel berkerangka filosofis (Lu [6]; Kristjansson [7]; Paddock [30]) justru menunjukkan bahwa secara teoretis keduanya kompatibel. Kesenjangan antara klaim normatif dan realitas implementasi ini merupakan temuan analitik yang paling signifikan dalam tema ini. Kajian Sim dan Tham [18] terhadap CCE Singapura menjembatani kedua kutub tersebut dengan menunjukkan bahwa integrasi formal dalam dokumen kebijakan tidak otomatis menyelesaikan ketegangan pada level implementasi, bahkan dalam sistem yang secara resmi menyatukan karakter dan kewarganegaraan. Pola ini mengonfirmasi bahwa kesenjangan antara kebijakan dan praktik bukan persoalan unik Indonesia, melainkan tantangan struktural yang bersifat lintas negara.

3.2 Model dan Strategi Pembelajaran Berbasis Nilai

Tema ini mencakup 15 artikel dan didominasi oleh penelitian empiris dari Indonesia. Beberapa model yang dikembangkan antara lain model RECE (*Reflective, Engage, Collaborative, Elaborative*) dalam PPKn oleh Sarkadi dkk. [19], model *living values-based digital learning resources* oleh Komalasari dkk. [11], model *authentic assessment* berbasis *living values* oleh Komalasari dan Masyitoh [20], serta *problem-based learning* dalam PPKn oleh Yunitasari dkk. [21]. Sartika dkk. [22] menemukan bahwa lima langkah pembelajaran (konseptualisasi, identifikasi, internalisasi, aktualisasi, evaluasi) meningkatkan tanggung jawab mahasiswa sebesar 62,50% melalui *action research*.

Perbandingan antarstudi dalam tema ini mengungkap ketimpangan metodologis yang penting. Seluruh penelitian dari Indonesia dalam tema ini menggunakan desain tanpa kelompok kontrol dan sampel terbatas pada satu hingga tiga sekolah di satu kota, sehingga klaim peningkatan karakter yang dilaporkan tidak dapat diverifikasi secara kausal. Sebaliknya, Moller dkk. [10] dari Chile menggunakan desain *quasi-experimental* dengan sampel kohort dan menemukan hasil yang lebih moderat: intervensi *service-learning* tidak menghasilkan perubahan signifikan secara statistik pada level kohort, dan hanya efektif pada subkelompok tertentu. Perbedaan temuan ini paling mungkin disebabkan oleh perbedaan rigoritas desain, bukan perbedaan efektivitas intrinsik modelnya. Pola ini secara kumulatif mengindikasikan bahwa corpus model pembelajaran berbasis nilai dari Indonesia, meskipun inovatif secara konseptual, belum memenuhi standar bukti kausal yang diperlukan untuk generalisasi kebijakan. Kebutuhan mendesak adalah replikasi model-model tersebut menggunakan desain yang lebih ketat.

3.3.3 *Civic disposition* dan *Civic competence* sebagai *Outcome*

Tema ini mencakup 8 artikel dan merupakan tema yang paling sedikit memiliki dukungan empiris meskipun secara teoritis paling sentral. Montessori dkk. [5] menemukan melalui penelitian *mixed methods* bahwa guru PKn SMP di Padang secara nyata mengabaikan pembentukan *civic disposition*, bukan karena tidak ada niat, melainkan karena ketidakcakapan, mode pembelajaran online, dan sistem asesmen yang hanya mengukur kognitif. Castillo [23] dalam penelitian *mixed methods* di komunitas lokal Filipina menemukan bahwa

dari empat domain *civic competence* (*civic rights, civic virtues, civic responsibilities, civic participation*), hanya domain *civic rights* yang terpenuhi secara penuh sementara tiga domain lainnya masih di level sedang. Wahyudi dkk. [24] dari konteks berbeda menemukan hasil yang lebih positif, di mana Pendidikan Pancasila di SMP Surabaya secara efektif mempromosikan *civic disposition* melalui aktivitas berbasis nilai dan berkontribusi pada penurunan insiden bullying.

Divergensi antara temuan Montessori dkk. [5] dan Wahyudi dkk. [24] sangat informatif secara analitik. Keduanya mengkaji *civic disposition* pada jenjang SMP di Indonesia, namun mencapai kesimpulan yang berlawanan. Perbedaan ini paling mungkin bersumber dari perbedaan periode pengamatan (Montessori selama pandemi vs. Wahyudi pada kondisi normal pascapandemi), perbedaan kompetensi dan motivasi guru yang diteliti, serta perbedaan konteks institusional sekolah. Temuan Castillo [23] dari Filipina memperkaya perbandingan dengan menunjukkan bahwa bahkan dalam konteks komunitas lokal, *civic competence* berkembang secara tidak merata lintas domain. Sintesis ketiga studi ini mengindikasikan bahwa *civic disposition* bukan variabel yang berkembang secara seragam, melainkan sangat tergantung pada kualitas implementasi dan kondisi kontekstual, yang implikasinya adalah intervensi yang tidak mempertimbangkan faktor-faktor ini cenderung menghasilkan hasil yang inkonsisten.

3.3.4 Global Citizenship education dan Integrasi Nilai Karakter

Tema ini mencakup 9 artikel yang mengkaji pertemuan antara nilai karakter dan agenda *global citizenship education* di berbagai konteks nasional. Indrawadi dkk. [25] menemukan bahwa dalam konteks Indonesia, sebagian besar guru meyakini bahwa identitas nasional harus dibangun terlebih dahulu sebelum kompetensi global dikembangkan. Pola ini berbeda dari model GCE Barat yang cenderung mendorong identitas kosmopolitan sebagai prioritas. Chung dan Fung [26] dari Taiwan menemukan berdasarkan survei terhadap 1.020 mahasiswa bahwa multikulturalisme memediasi hubungan antara *moral education* dan *civic engagement* melalui *political self-efficacy* dan kepercayaan terhadap sistem demokratis. Kubow [27] mengkritik pendekatan GCE yang masih berorientasi negara-bangsa dan mengusulkan model dekolonial berbasis filsafat Ubuntu dari tradisi Afrika. Lasten dkk. [28] menemukan disparitas implementasi GCE antara sekolah negeri dan swasta di Curacao.

Perbandingan lintas konteks dalam tema ini mengungkap adanya spektrum orientasi GCE. Studi-studi dari Indonesia dan negara-negara berkembang (Indrawadi dkk. [25]; Lasten dkk. [28]) menunjukkan pola yang mengutamakan pembangunan identitas nasional sebelum identitas global, sedangkan studi dari Taiwan (Chung & Fung [26]) menunjukkan bahwa kedua identitas dapat berkembang secara paralel melalui mediasi multikulturalisme. Perbedaan ini mencerminkan perbedaan fundamental dalam asumsi ontologis tentang identitas kewarganegaraan yang tidak dapat diselesaikan oleh satu model GCE universal. Untuk konteks Indonesia, temuan Indrawadi dkk. [25] memiliki relevansi langsung dengan Profil Pelajar Pancasila yang menempatkan dimensi berkebhinekaan global berdampingan dengan dimensi beriman dan bertakwa, yang secara implisit mencerminkan logika pembangunan identitas berlapis yang berbeda dari model kosmopolitan Barat.

3.3.5 Analisis Kurikulum dan Kebijakan

Dua belas artikel dalam tema ini mengungkapkan pola yang berulang di berbagai negara. Brown dkk. [8] menganalisis dokumen kebijakan dari China, Inggris, Meksiko, dan Spanyol, dan menemukan lima tema nilai yang serupa lintas negara (keadilan, harmoni, toleransi, pemahaman internasional, dan kesetaraan). Namun analisis mereka juga mengungkapkan bahwa dokumen-dokumen ini cenderung mengedepankan pemahaman kognitif atas nilai ketimbang transformasi perilaku dan implementasi praktis. Di Indonesia, Afriadi dkk. [29] mengevaluasi tiga kurikulum *civic education* (KTSP, K13, Kurikulum Merdeka) berdasarkan survei dan wawancara dengan guru dan kepala sekolah di 85 sekolah di Tangerang, dan menemukan bahwa Kurikulum Merdeka dinilai paling efektif dalam *character development*, meskipun data tersebut bersumber dari persepsi guru bukan pengukuran langsung karakter siswa.

Sintesis dari 12 artikel dalam tema ini mengidentifikasi sebuah paradoks kebijakan yang bersifat lintas negara: semakin komprehensif dokumen kebijakan mengintegrasikan nilai karakter dan kewarganegaraan di atas kertas, semakin besar potensi kesenjangan antara tujuan yang dideklarasikan dengan praktik implementasi di kelas. Brown dkk. [8] menunjukkan ini terjadi di empat negara secara bersamaan, sementara Choo dkk. [35] mengkonfirmasi untuk Singapura melalui perspektif guru. Afriadi dkk. [29] menambahkan konteks Indonesia di mana bahkan penilaian positif guru terhadap Kurikulum Merdeka tidak didukung oleh data pengukuran karakter siswa secara langsung. Pola lintas negara ini menunjukkan bahwa reformasi dokumen kurikulum tanpa disertai reformasi sistem asesmen dan peningkatan kompetensi pedagogis guru cenderung tidak menghasilkan perubahan yang substantif pada level pembentukan karakter siswa.

3.3.6 Pendekatan Filosofis

Delapan artikel menggunakan kerangka filosofis, dengan Aristotelianisme mendominasi. Paddock [30] berargumen bahwa habituasi cardinal virtues (keberanian, keadilan, kebijaksanaan praktis, dan kesederhanaan) merupakan bentuk *citizenship education* yang sah dalam kerangka liberal Rawlsian karena virtues tersebut diperlukan untuk stabilitas demokrasi konstitusional. Smith dan Pacini [31] mengkaji apakah *civic virtues* merupakan karakter tersendiri atau instansiasi politik dari karakter moral umum, dan menyimpulkan bahwa ambiguitas filosofis ini justru dapat dimanfaatkan untuk mengajarkan kemampuan menoleransi kompleksitas. Wong [32] menawarkan alternatif non-Barat melalui metode *deep reading* Zhu Xi dari Neo-Konfusianisme sebagai wahana pengembangan tiga *civic virtues* (*carefulness*, *patience*, dan *modesty*) yang relevan untuk deliberasi demokratis.

Perbedaan paling mencolok dalam tema ini adalah antara artikel yang menggunakan kerangka Aristotelian-Barat (Lu [6]; Kristjansson [7]; Paddock [30]; Smith & Pacini [31]) dengan artikel yang menawarkan alternatif non-Barat (Wong [32]; Kubow [27]). Artikel-artikel Aristotelian mengasumsikan universalitas konstruk *virtue* dalam konteks demokrasi liberal, sementara Wong [32] dan Kubow [27] secara eksplisit mempertanyakan asumsi tersebut. Untuk konteks Indonesia, perspektif non-Barat ini relevan mengingat nilai-nilai Pancasila yang tidak sepenuhnya bersesuaian dengan kerangka liberal-individualis. Sintesis dari tema ini menunjukkan bahwa kerangka filosofis yang digunakan akan menentukan model pendidikan karakter yang dikembangkan, dan penelitian berbasis konteks lokal Indonesia membutuhkan kerangka yang mempertimbangkan tradisi nilai Pancasila sebagai fondasi, bukan sekadar adaptasi dari model Aristotelian Barat.

3.3.7 Kritik terhadap Praktik *Character education*

Delapan artikel menghadirkan kritik substantif yang penting untuk dipahami. Jerome dan Kisby [33] menganalisis sumber belajar *character education* dari *Jubilee Centre for Character and Virtues* di Inggris dan menemukan bahwa sumber-sumber tersebut terlalu individualistik, paternalistik, dan terputus dari dimensi *civic* yang kritis. Duncan dan Oto [34] mengkritik bahwa bentuk-bentuk dominan *citizenship education* di AS masih terikat pada *anti-Black character education* yang melanggengkan hegemoni rasialisme liberal, dan mengusulkan kerangka *feminist* kritis berbasis solidaritas, resistensi humanis, dan aksi liberatif sebagai alternatif. Choo dkk. [35] dalam survei nasional terhadap 585 guru SMA Singapura menemukan bahwa guru menghadapi kesulitan nyata dalam menyeimbangkan nilai harmoni sosial yang cenderung konservatif dengan nilai kritis yang mendorong perubahan sosial dalam CCE.

Ketiga kritik ini, meskipun berasal dari konteks yang berbeda (Inggris, AS, dan Singapura), memiliki benang merah yang sama: *character education* dalam praktiknya cenderung memprioritaskan kepatuhan dan harmoni sosial di atas pemberdayaan kritis warga negara. Perbedaananya terletak pada mekanisme dominasi yang dikritik: Jerome dan Kisby [33] mengkritik neoliberalisme, Duncan dan Oto [34] mengkritik rasisme struktural, sementara Choo dkk. [35] mengkritik konservatisme negara-kota. Kecenderungan lintas konteks ini memiliki implikasi serius bagi implementasi Profil Pelajar Pancasila di Indonesia: jika dimensi bernalar kritis tidak dikembangkan secara genuine melainkan hanya sebagai retorika kurikulum, maka risiko yang sama dapat terjadi, di mana karakter yang dihasilkan adalah kepatuhan yang tampak kritis, bukan kemampuan kritis yang otentik.

3.4 Kesenjangan Penelitian

Berdasarkan analisis sistematis terhadap 60 artikel, terdapat enam kesenjangan yang secara nyata terbukti dari data. Pertama dan paling signifikan, tidak ada satu pun penelitian yang secara khusus mengkaji pendidikan karakter dalam PKn pada jenjang pendidikan vokasi. Mengingat besarnya populasi siswa SMK di Indonesia dan kebutuhan mereka terhadap *civic character* sebagai bekal bermasyarakat, gap ini merupakan peluang penelitian yang paling nyata dan mendesak.

Kedua, pengukuran empiris *civic disposition* sebagai variabel terukur masih sangat terbatas. Dari 60 artikel hanya 3 yang mengoperasionalkan *civic disposition* sebagai variabel yang diukur, sementara mayoritas menyebutnya sebagai tujuan abstrak. Ketiga, tidak ada penelitian *longitudinal* dalam *corpus* ini. Semua studi empiris bersifat *cross-sectional* atau *pre-post test* tanpa tindak lanjut, sehingga perubahan karakter jangka panjang belum terdokumentasikan. Keempat, penelitian di kawasan ASEAN selain Indonesia dan Singapura sangat terbatas. Kelima, integrasi pendidikan karakter dengan Profil Pelajar Pancasila dalam Kurikulum Merdeka belum diteliti secara mendalam melalui pengukuran dampak langsung pada siswa. Keenam, perspektif siswa hampir tidak ada, karena sebagian besar penelitian mengandalkan perspektif guru, dokumen kebijakan, atau peneliti.

3.5 Implikasi terhadap Kurikulum Merdeka dan Pendidikan Vokasi

Temuan SLR ini memiliki implikasi langsung yang dapat dioperasionalkan dalam konteks Kurikulum Merdeka. Paradoks kebijakan yang teridentifikasi dalam Tema 5 yaitu bahwa integrasi karakter dan kewarganegaraan dalam dokumen kurikulum tidak otomatis terwujud dalam praktik pembelajaran, secara langsung relevan dengan implementasi Profil Pelajar Pancasila. Temuan Brown dkk. [8] yang menemukan bahwa kebijakan pendidikan nilai di empat negara lebih mengutamakan pemahaman kognitif ketimbang transformasi perilaku mengisyaratkan bahwa tanpa desain asesmen yang mengukur dimensi afektif dan behavioral secara eksplisit, Profil Pelajar Pancasila berisiko mengalami nasib yang sama.

Secara lebih spesifik, ketiadaan penelitian pada jenjang pendidikan vokasi dalam corpus 60 artikel ini perlu dibaca dalam konteks Indonesia yang memiliki lebih dari 13.700 SMK dengan peserta didik mencapai 5,1 juta jiwa (data BPS, 2023). Siswa SMK adalah calon warga negara produktif yang akan memasuki dunia kerja lebih awal dibandingkan lulusan SMA, sehingga pembentukan civic character yang mencakup tanggung jawab sosial, etika kerja berbasis nilai, dan kecakapan berpartisipasi dalam kehidupan sipil memiliki urgensi yang berbeda dibandingkan konteks pendidikan umum. Model living values-based learning yang dikembangkan Komalasari dkk. [11] dan model RECE dari Sarkadi dkk. [19] secara konseptual dapat diadaptasi untuk konteks SMK, namun adaptasi tersebut memerlukan pengujian empiris yang belum pernah dilakukan. Penelitian yang mengisi gap ini tidak hanya bernilai akademik, tetapi juga memiliki dampak kebijakan langsung terhadap desain pembelajaran Pendidikan Pancasila di SMK dalam kerangka Kurikulum Merdeka.

Pada tataran pedagogis, temuan konsisten dari beberapa konteks nasional bahwa guru mengabaikan pembentukan civic disposition bukan karena ketiadaan regulasi melainkan karena ketidakcakapan pedagogis (Montessori dkk. [5]; Choo dkk. [35]) mengimplikasikan bahwa reformasi kurikulum tanpa reformasi pengembangan profesional guru tidak akan menghasilkan perubahan yang substantif. Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan pelatihan in-service yang ada perlu secara eksplisit mencakup kompetensi mengintegrasikan values-based education dalam pembelajaran PKn, termasuk desain asesmen yang mencakup dimensi civic disposition, bukan hanya penguasaan materi dan keterampilan pedagogis umum.

4. KESIMPULAN

SLR ini menganalisis 60 artikel Scopus periode 2021-2026 tentang pendidikan karakter dalam pendidikan kewarganegaraan. *Thematic synthesis* menghasilkan tujuh tema utama yang mencerminkan kondisi penelitian global pada topik ini. Temuan yang paling dominan dan konsisten adalah bahwa konsensus konseptual tentang perlunya integrasi pendidikan karakter dan pendidikan kewarganegaraan sudah cukup kuat pada level filosofis dan kebijakan, namun integrasi tersebut belum terwujud secara sistematis dalam praktik pembelajaran di berbagai konteks nasional. Hasil penelitian dalam tema model pembelajaran masih beragam dan belum dapat digeneralisasi, terutama karena mayoritas penelitian empiris menggunakan desain tanpa kelompok kontrol dan tidak bersifat *longitudinal*.

Kesenjangan penelitian yang paling nyata adalah tidak adanya penelitian pada jenjang pendidikan vokasi, minimnya pengukuran empiris *civic disposition* sebagai variabel terukur, dan tidak adanya studi *longitudinal*. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui secara transparan. Pertama, penggunaan satu basis data (Scopus) tanpa triangulasi dengan Web of Science, ERIC, atau Google Scholar berpotensi melewatkan artikel-artikel relevan yang terindeks secara eksklusif di luar Scopus, khususnya penelitian dari jurnal pendidikan nasional Asia Tenggara. Kedua, pembatasan bahasa Inggris menyebabkan penelitian berkualitas tinggi yang dipublikasikan dalam bahasa Indonesia, Melayu, Mandarin, atau bahasa lain tidak masuk dalam corpus, yang berpotensi menghasilkan bias representasi terhadap konteks non-Anglofon. Ketiga, terdapat potensi publication bias yang inheren dalam basis data akademik terindeks: studi yang melaporkan hasil intervensi yang positif lebih mungkin dipublikasikan dibandingkan studi dengan hasil negatif atau null, sehingga corpus penelitian ini kemungkinan overrepresentasi terhadap keberhasilan model-model pembelajaran yang dikembangkan. Keempat, meskipun proses seleksi artikel telah dilakukan melalui mekanisme tim peneliti dengan verifikasi dan konsensus antar-anggota, tidak dihitungnya koefisien kesepakatan formal seperti Cohen's Kappa menjadi keterbatasan metodologis yang perlu diakui, dan penelitian SLR selanjutnya disarankan untuk melaporkan koefisien tersebut secara eksplisit guna memenuhi standar pelaporan rigor yang semakin ketat dalam komunitas akademik. Kelima, rentang waktu 2021-2026 tidak mencakup penelitian sebelum 2021 yang mungkin relevan sebagai konteks historis dan mungkin telah menjawab beberapa pertanyaan yang masih dianggap terbuka dalam corpus ini.

Berdasarkan temuan dan keterbatasan tersebut, berikut rekomendasi praktis yang dirumuskan dari hasil SLR ini. Bagi guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, penting untuk mengintegrasikan asesmen *civic disposition* secara eksplisit dalam rancangan pembelajaran, tidak hanya melalui penilaian kognitif, serta menggunakan model pembelajaran berbasis nilai seperti *living values-based learning* yang telah menunjukkan potensi efektif dalam konteks Indonesia. Bagi pengembang kurikulum, perlu memastikan bahwa Profil Pelajar

Pancasila dilengkapi dengan instrumen pengukuran yang operasional dan terstandar, bukan hanya sebagai deskripsi normatif. Bagi pembuat kebijakan, reformasi sistem asesmen nasional yang mencakup dimensi afektif dan behavioral kewarganegaraan perlu diprioritaskan, serta perlu pengembangan program PPG yang secara eksplisit membangun kompetensi pedagogis berbasis nilai. Bagi peneliti selanjutnya, prioritas utama adalah penelitian empiris tentang pembentukan *civic character* siswa SMK dengan desain *quasi-experimental* atau longitudinal, pengembangan instrumen pengukuran *civic disposition* yang valid dan *reliabel* untuk konteks Indonesia, serta replikasi studi dengan melibatkan minimal dua reviewer independen dan menghitung Cohen's Kappa untuk meningkatkan rigoritas SLR.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] T. Lickona, *Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*. New York: Bantam Books, 1991.
- [2] Kemdikbudristek, *Panduan Pengembangan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022.
- [3] M. S. Branson, "The role of *civic* education," Position Paper from the Communitarian Network, Center for *Civic* Education, Calabasas, CA, 1998.
- [4] A. Peterson dan D. Civil, "Virtues, values and the fracturing of *civic* and *moral virtue* in citizenship education policy in England," *Educational Review*, vol. 75, no. 2, hal. 200-216, 2023. doi: 10.1080/00131911.2021.2023105.
- [5] M. Montessori, Fatmariza, J. Indrawadi, Ambiyar, M. Tiara, dan S. Islami, "Neglected values: *civic* disposition in junior high *civic* education during the pandemic," *Cogent Education*, vol. 11, no. 1, hal. 2300909, 2024. doi: 10.1080/2331186X.2023.2300909.
- [6] Y.-C. Lu, "The compatibility of *character education* and *citizenship education* in Aristotelian approaches to moral development," *Journal of Moral education*, vol. 54, no. 1, 2025. doi: 10.1080/03057240.2024.2354746.
- [7] K. Kristjansson, "The primacy of *civic virtue* in Aristotle's Politics and its educational implications," *History of Political Thought*, vol. 43, no. 4, hal. 1-24, 2022.
- [8] E. Brown, D. Chen, I. Davies, A. Urbina Garcia, dan I. Munguia Godinez, "Educating young people about society in China, England, Mexico and Spain: similar approaches to values education from different contexts," *Compare*, vol. 51, no. 3, hal. 1-18, 2021. doi: 10.1080/03057925.2019.1647513.
- [9] P. Mahanani, S. Akbar, A. Y. B. Kamaruddin, dan Z. B. Hussin, "Educational analysis to develop character in Malaysia and Indonesia," *International Journal of Instruction*, vol. 15, no. 3, hal. 383-400, 2022. doi: 10.29333/iji.2022.15321a.
- [10] F. Moller, P. Redondo-Corcobado, dan J. L. Fuentes, "Empowering students, enhancing communities: Integrating *Service-learning* as a *character education* methodology in a Chilean school," *Journal of Moral education*, 2025. doi: 10.1080/03057240.2025.2559360.
- [11] K. Komalasari, S. Fitriasari, dan D. N. Anggraini, "*Living values-based digital learning resources* in *civic* education," *New Educational Review*, vol. 63, no. 1, hal. 73-83, 2021. doi: 10.15804/ner.2021.63.1.07.
- [12] M. W. Berkowitz, M. C. Bier, dan B. McCauley, "Toward a science of *character education*," *Journal of Character education*, vol. 13, no. 1, hal. 33-51, 2017. [Dipertahankan sebagai SLR pembanding; tidak tersedia pengganti mutakhir dengan scope yang setara]
- [13] D. K. Lapsley dan D. Yeager, "*Moral-character education*," dalam *Handbook of Psychology*, W. M. Reynolds, G. E. Miller, dan I. B. Weiner, Ed. Hoboken: Wiley, 2013, hal. 683-707. [Dipertahankan sebagai chapter handbook fundamental; tidak ada pengganti setara 2021-2026]
- [14] M. J. Page dkk., "The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews," *BMJ*, vol. 372, hal. n71, 2021. doi: 10.1136/bmj.n71.
- [15] Y. Xiao dan M. Watson, "Guidance on conducting a *Systematic Literature Review*," *Journal of Planning Education and Research*, vol. 39, no. 1, hal. 93-112, 2019. doi: 10.1177/0739456X17723971.
- [16] J. Thomas dan A. Harden, "Methods for the *thematic synthesis* of qualitative research in systematic reviews," *BMC Medical Research Methodology*, vol. 8, hal. 45, 2008. doi: 10.1186/1471-2288-8-45.

-
- [17] K. E. Jordan, O. P. Jonsson, R. Gudjohnsen, S. Adalbjarnardottir, dan U. E. Gardarsdottir, "Citizenship, character, sustainability: Differences and commonalities in three fields of education," *Journal of Moral Education*, vol. 52, no. 2, hal. 189-204, 2023. doi: 10.1080/03057240.2022.2159348.
 - [18] J. B.-Y. Sim dan P. H.-H. Tham, "Demystifying *character education* for the Singapore context," *Journal of Moral education*, vol. 54, no. 2, 2025. doi: 10.1080/03057240.2023.2260957.
 - [19] Sarkadi, A. R. Casmana, C. J. Hisyam, dan I. Wardatussa'idah, "Integrating *character education* into the RECE learning model through Pancasila and *citizenship education* subjects," *Frontiers in Education*, vol. 7, hal. 841037, 2022. doi: 10.3389/educ.2022.841037.
 - [20] K. Komalasari dan I. S. Masyitoh, "The effect of *living values*-based authentic assessment on character development of high school student," *New Educational Review*, vol. 67, no. 1, hal. 81-93, 2022. doi: 10.15804/ner.22.67.1.08.
 - [21] D. Yunitasari, I. W. Lasmawan, I. B. P. Arnyana, dan I. M. Ardana, "Innovative learning: Problem-based learning enhances character and learning *outcomes* in elementary schools," *Educational Process: International Journal*, vol. 16, hal. 202, 2025. doi: 10.22521/edupij.2025.16.202.
 - [22] R. Sartika, B. Maftuh, E. S. Nurdin, dan D. Budimansyah, "Strengthening students' responsible character through *civic* education learning: An action research in Indonesia," *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research*, vol. 23, no. 3, hal. 1-18, 2024. doi: 10.26803/ijlter.23.3.21.
 - [23] L. F. Castillo, "*Civic competence* as a social service dimension: Context of a local community in the Philippines," *Journal of Social Service Research*, vol. 49, no. 4, hal. 418-430, 2023. doi: 10.1080/01488376.2023.2232826.
 - [24] Wahyudi dkk., "*Civic* education and bullying: Strengthening the *civic disposition* in preventing bullying in junior high schools," *Journal of Educational, Cultural and Psychological Studies*, 2026. doi: 10.7358/ecps-2025-032-wahy.
 - [25] J. Indrawadi, I. Moeis, R. Febriani, Z. F. Luthfi, dan A. R. Casmana, "*Global Citizenship education*: Lesson learned from Indonesia," *Citizenship Teaching and Learning*, vol. 20, no. 1, hal. 1-18, 2025. doi: 10.1386/ctl_00192_1.
 - [26] M.-L. Chung dan K. K.-W. Fung, "A new paradigm of *moral education* and *civic engagement*? A sociological institutionalist interpretation of multiculturalism among Taiwanese youth," *Journal of Moral education*, vol. 53, no. 3, hal. 301-317, 2024. doi: 10.1080/03057240.2024.2354964.
 - [27] P. K. Kubow, "Ubuntu: An African moral ethic to advance a critical democratic global citizenship education," *Educational Practice and Theory*, vol. 47, no. 1, 2025. doi: 10.7459/ept/470102.
 - [28] E. Lasten, R. S. Upchurch, dan G. Christina, "The state of *Global Citizenship education* within Curacao's primary school system," *Education 3-13*, vol. 51, no. 5, hal. 740-752, 2023. doi: 10.1080/03004279.2022.2052339.
 - [29] B. Afriadi, Komarudin, dan A. Sutisna, "Evaluation of the effectiveness of the *civic* education curriculum in Indonesia: A case study of the KTSP curriculum, the 2013 curriculum, and the independent curriculum," *Journal of Curriculum and Teaching*, vol. 13, no. 5, hal. 331-342, 2024. doi: 10.5430/jct.v13n5p331.
 - [30] C. Paddock, "Cardinal virtue habituation as liberal *citizenship education*," *Journal of Philosophy of Education*, vol. 55, no. 1, hal. 155-167, 2021. doi: 10.1111/1467-9752.12543.
 - [31] N. Smith dan B. Pacini, "What to do with *civic virtue*," *Educational Theory*, vol. 76, no. 1, 2026. doi: 10.1111/edth.70094.
 - [32] B. Wong, "Careful, patient, and modest citizens: Facilitating *civic* education through Zhu Xi's method of *deep reading*," *Educational Philosophy and Theory*, 2025. doi: 10.1080/00131857.2024.2441380.
 - [33] L. Jerome dan B. Kisby, "Lessons in *character education*: Incorporating neoliberal learning in classroom resources," *Critical Studies in Education*, vol. 63, no. 1, hal. 34-49, 2022. doi: 10.1080/17508487.2020.1733037.
 - [34] K. E. Duncan dan R. Oto, "Solidarity, resistance, and liberatory action: Toward a Black *feminist citizenship education* framework," *American Educational Research Journal*, 2026. doi: 10.3102/00028312261445087.
 - [35] S. S. Choo, J. B.-Y. Sim, dan B. L. Chua, "Integrating the values of social harmony and criticality: Perspectives from Singapore's approach to character and *citizenship education*," *Asia Pacific Journal of Education*, 2025. doi: 10.1080/02188791.2025.2511749.